BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian PKPU atas Kreditor Separatis oleh Hakim terkait Keabsahan Rapat Kreditor dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 6 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015 menunjukkan adanya penyimpangan terhadap aspek prosedural dan formalitas keabsahan rapat kreditor. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali telah meninjau kembali putusan sebelumnya dengan tidak mempertimbangkan secara cermat syarat keabsahaan rapat kreditor terkait kuorum dan tata cara pemungutan suara sesuai 281 ayat (1) b Jo 285 UU Kepailitan dan PKPU seharusnya tidak dapat dilakukan perpanjangan rencana perdamaian dikarenakan memperpanjang perdamaian dengan masuknya investor baru.
2. Perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam proses PKPU, sebagaimana dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 6 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015 menghadapi tantangan, khususnya Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, secara tegas memberikan hak kepada kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, yang merupakan bentuk kepastian hukum atas hak kebendaan. Namun, hak eksekusi belum dapat dilakukan dikarenakan rencana perdamaian masih di perpanjangan. Dinamika Putusan dalam studi kasus ini menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur rapat kreditor dapat berujung pada konsekuensi yang secara tidak langsung berdampak pada upaya perlindungan hak-hak kreditor separatis. Keadilan bagi kreditor separatis terwujud ketika hak-haknya dihormati dan tidak tergerus oleh kelalaian prosedural, sementara kepastian hukum tercermin dari penegakan aturan main yang jelas dalam pelaksanaan rapat kreditor. Perpanjangan rencana perdamaian yang disetujui oleh Hakim tidak melibatkan

persetujuan dari kreditur separatis sehingga invertor baru dapat mundur sewaktu-waktu yang merugikan kreditur separatis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk melakukan kajian ulang atau amandemen terbatas pada pasal 281 juncto 285 UU Kepailitan dan PKPU terhadap perdamaian yang kerap menimbulkan multi-interpretasi atau celah hukum, khususnya terkait prosedur dan konsekuensi hukum dari pelanggaran keabsahan rapat kreditur, demi tercapainya kepastian hukum yang lebih optimal dan standarisasi prosedur rapat kreditur yang lebih rinci bagi Pengurus/Kurator untuk menyelenggarakan rapat kreditur agar minim risiko cacat keabsahan agar adanya penekanan kuat pada aspek prosedural dan formalitas keabsahan rapat kreditur sebagai penentu sah atau tidaknya rencana perdamaian .
2. Diperlukannya perubahan pada Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU atau aturan lain yang mengatur seraca tegas apabila adanya investor baru maka memerlukan persetujuan dari Kreditur Separatis melalui komitmen jaminan investor dikarenakan merugikan kreditur separatis yang harus menunda hak preference eksekusinya dikarenakan status belum insolvensi.